PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DIDETERMINASI OLEH PENAGIHAN PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK (Pada Salah Satu KPP di Kota Bandung Periode 2012-2016)

Personal Income Tax Revenue Determined By Tax Collection and Ekstensification of Taxpayers (On One KPP in Bandung Period 2012-2016)

Oleh:
Winda Yulianti - 21112194
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

Abstract

The phenomenon that happened in the Regional Office of the on one KPP in Bandung was the letter force published and the number of tax payers in decline and amongst the individual income tax increase. Should if the number of a force and the number of taxpayers up and income tax revenue individual and also increased .The purpose of this research to analyze income tax revenue individual and dideterminasi by extension billing taxes and tax payers more on one KPP in Bandung Period 2012-2016.

This research uses descriptive analysis method and verification with quantitative approach. The data obtained are secondary data in the form income tax of personal income and the number of forced letters issued and number of taxpayers for 5 years, in year 2012-2016 in the on one KPP in Bandung. Multiple regression analysis and hypothesis test (t test) is used in this study to test the regression coefficient with 5% significance level. In addition, the classical assumption test included normality test, multi collinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test.

The result showed that income tax revenue individual and dideterminasi by extension billing taxes and taxpayers .Income tax revenue individual and dideterminasi by extension billing taxes and taxpayers have a positive relationship with a low coefficient.

***Keyword** : Personal Income Tax Revenue, Tax Collection, and Ekstensification of Taxpayers.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dari sektor pajak sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan (Rahayu, 2007). Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan maka setiap tahunnya Dirjen pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Rahayu, 2007). Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat disetiap tahunnya (Harinurdin, 2009). Bagi pemerintah, pajak mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan negara (Modigliani dan Miller, 1958; dalam Wibisono, 2009). Berdasarkan fungsi ini, pajak adalah bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan ke pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional (Modigliani dan Miller, 1958; dalam Wibisono, 2009).

Penagihan pajak diharapkan menjadi ujung tombak KPP dalam menghimpun penerimaan pajak (Darmin Nasution, 2009). Namun dalam kenyatannya dalam pelaksanaan penagihan pajak dari diterbitkannya surat teguran sampai dilakukan penyitaan masih ditemukan wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya tersebut (Darmin Nasution, 2009). Penagihan bertujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak, surat tagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ginting, 2006). Penagihan pajak menggunakan surat paksa untuk salah satu sarana penagihan pajak, surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang

tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (Siti Resmi, 2009).

Terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu peningkatan jumlah wajib pajak (Nasution, 2003). Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak akan semakin bertambah jumlahnya, mungkin memang terlihat sempurna jika jumlah wajib pajak semakin meningkat dari memiliki NPWP sampai melaporkan SPT (Nasution, 2003). Akan tetapi, hal itu tidak menjamin tunggakan pajak akan menurun (Nasution, 2003). Dikhawatirkan semakin banyak jumlah wajib pajak maka semakin besar kemungkinan wajib pajak yang menunggak (Nasution, 2003). Potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPh) selama dasawarsa 1990-2000 diantaranya dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor-faktor Produk Domestik Bruto dan Jumlah Wajib Pajak yang meningkat (Nasution, 2003).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditariklah topik untuk melakukan penelitian yaitu **"Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dideterminasi Oleh Penagihan Pajak Dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada Salah Satu KPP Di Kota Bandung".**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Seberapa besar penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dideterminasi oleh penagihan pajak.
2) Seberapa besar penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dideterminasi oleh ekstensifikasi wajib pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dideterminasi oleh penagihan pajak dan ekstensifikasi wajib pajak dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui dan mengkaji besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dideterminasi oleh penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.
2) Untuk mengetahui dan mengkaji besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dideterminasi oleh ekstensifikasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi penulis
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat membandingkan antara materi yang teglah didapatkan selama masa perkuliahan dengan keadaan nyata yang terjadi di lapangan.
2) Bagi Instansi
   Kegunaan bagi instansi diharapakan dapat memberi informasi mengenai peneriman pajak penghasilan orang pribadi yang dideterminasi oleh penagihan pajak dan ekstesifikasi wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu akuntansi pajak dalam materi penerimaan pajak, penagihan pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.

2) Bagi Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai penerapan teori akan materi Akuntansi Perpajakan khususnya materi penerimaan pajak dan keberlangsungan perekonomian negara yang dideterminasi oleh penagihan pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (2012) adalah sebagai berikut:

> "Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan pajak meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas".

Menurut Mardiasmo (2013:147) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.1.1.1 Indikator Pengnagihan Pajak

Indikator penagihan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012:246) yang mengatakan bahwa:

"Direktur jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, apabila jumlah tindakan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk penagihan pajak adalah surat paksa yang diterbitkan.

2.1.2 Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis (2012:28) definisi Ekstensifikasi Pajak adalah sebagai berikut:

> "Upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru".

2.1.2.1 Indikator Ekstensifikasi Wajib Pajak

Indikator ekstensifikasi wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Edi Slamet Irianto (2014:171) yang mengatakan bahwa:

"Direktur Jendral Pajak melakukan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar atau pengusaha kena pajak (PKP)".

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut John Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak yaitu:

> "Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

2.1.3.1 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut Rahmad Husein dkk (2013), bahwa:

> "Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dalam jutaan rupiah".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dideterminasi Oleh Penagihan Pajak

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dideterminasi oleh penagihan pajak berikut dalam teori menurut Erly Suandy (2011) menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak

melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita. Syahab dan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin meningkatnya penagihan pajak maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak teori ini dikatakan oleh Waluyo (2009:238).

2.2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dideterminasi Oleh Ekstensifikasi Wajib Pajak

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dideterminasi oleh ekstensifikasi wajib pajak, dimana ekstensifikasi adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru (Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012:28). Teori yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (2012) yang menyatakan bahwa untuk menunjang penerimaan Negara dalam bidang perpajakan dapat ditempuh salah satunya dengan cara perluasan dan peningkatan wajib pajak.

Teori kontribusi perkapita menyatakan, semakin banyak jumlah Wajib Pajak semakin tinggi jumlah penerimaan karena semakin banyak jumlah kontributornya, nampaknya perlu peningkatan kualitas calon Wajib Pajak potensial, sehingga tercapai suatu keseimbangan baru *tax percapita* yang semakin meningkat (Edi Slamet Irianto, Rosdiana, dkk, 2012 : 25).

Ekstensifikasi wajib pajak merupakan salah satu upaya Direktur Jenderal Pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03/PJ./2006 tentang Tim Optimalisasi penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan pajak diperlukan langkah-langkah strategis dan konkrit berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang dideduksi melalui proposisi yang ada dalam paradigma penelitian, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H_1: Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dideterminasi oleh penagihan pajak.

H_2: Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dideterminasi oleh ekstensifikasi wajib pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Iqbal Hasan (2004:4) metode penelitian adalah sebagai berikut:

> "Penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya)".

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dimana metode deskriptif merupakan suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, sedangkan metode verifikatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Menurut Sugiyono (2009:21) pengertian metode deskriptif adalah sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Menurut Sugiyono (2012:55) metode verifikatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih.

1) Berdasarkan sifatnya, Menurut Sugiyono (2003:14) terdapat beberapa jenis penelitian antara lain: Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
2) Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.

Berdasarkan konsep diatas, maka dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatf merupakan metode yang bertujuan menggambarkan benar tidaknya fakta-fakta yang ada serta menjelaskan tentang hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan Penagihan Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji lebih dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dideterminasi oleh Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2013:38) tentang variabel penelitian menyatakan bahwa:

> "Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Sesuai dengan judul penelitian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dideterminasi Oleh Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak, maka peneliti membedakan dua variabel yang digunakan yaitu: variabel bebas (*Independent Variable*) dan variabel terikat (*Dependent Variable*) akan diuraikan sebagai berikut:

1) Variabel bebas (*Independent Variable*)
   Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Penagihan Pajak (X_1) dan Ekstensifikasi Wajib Pajak (X_2) dengan jumlah pemberitahuan surat paksa dan data jumlah wajib pajak terdaftar sebagai indikator dari masing-masing variabel bebas.
2) Variabel terikat (*Dependent Variable*)
   Variabel terikat merupakan variabel yang ditentukan atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y) dengan hasil realisasi jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi yang menjadi indikatornya.

3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:137) data Sekunder adalah sebagai berikut:

> "Data yang diperoleh dari pihak lain seperti artikel, literatur, buku-buku, karya tulis lainnya dan termasuk data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan kedalam bentuk tabel serta data-data dari perusahaan".

Berdasarkan sumber data diatas peneliti menggunakan tipe data sekunder karena penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan karya tulis. Data-data yang diperoleh dari perusahaan maupun instansi yang menjadi referensi penelitian ini. Tujuannya untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada setiap tahunnya.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan uatama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara sebagai berikut:

1) Survei
   Penelitian ini dilakukan dengan survei langsung pada Salah Satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung untuk mendapatkan data yang diperlukan.
2) Dokumentasi

Bersamaan dengan survei tersebut pengumpulan data yang dibutuhkan atau dengan cara mencatat data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang dimiliki instansi.

3.4 Populasi, Sampel, dan Tempat serta Waktu Peneliti

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014:117), populasi penelitian didefinisikan sebagai berikut:

> "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas *objek/subyek* yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini diambil dari periode 2012-2016 yaitu 60 laporan bulanan dari data perbulan (12 bulan) dalam 5 periode mengenai jumlah pemberitahuan surat paksa, data jumlah wajib pajak terdaftar dan hasil realisasi jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pada Salah Satu KPP di Kota Bandung.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2010:122) menjelaskan bahwa:

> "Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Methods For Business dikutip Sugiyono (2013:130) dalam buku memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini:

> "Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Ukuran yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500".

Pengambilan sampel di Salah Satu KPP Di Kota Bandung adalah periode 2012-2016. Jumlah sampel yaitu 60 laporan bulanan diperoleh dari data perbulan (12 bulan) dalam 5 periode mengenai jumlah pemberitahuan surat paksa, data jumlah wajib pajak terdaftar dan hasil realisasi jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pada Salah Satu KPP Di Kota Bandung.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
   Penulis mengunakan data-data sekunder berupa dokumen yang terdapat pada Salah Satu KPP Di Kota Bandung. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data mengenai Penagihan Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak, data realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi dan informasi-informasi lain yang diperlukan dalam penelitian.
2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
   Penelitian kepustakaan ini adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, buku, hasil penelitian yang sejenis dan media lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan metodologi penelitian, dan sebagainya. Selain itu, penulis juga menggunakan media internet sebagai penelusuran informasi mengenai teori maupun data-data penelitian yang dilakukan.
3) Riset Internet (*Online Research*)
   Pengumpulan data berasal dari situs-situs yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan.

3.6 Metode Pengujian Data

1) Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi yaitu:

a) Uji Normalitas

Menurut Singgih Santoso (2002:393) menjelaskan bahwa:

"Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu: a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal. b. Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal".

b) Uji Multikolinieritas

Menurut Gujarati (2003: 362) menjelaskan bahwa:

"Dimana Ri 2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel bebas Xi terhadap variabel bebas lainnya.Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas".

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gujarati (2003: 406) menjelaskan bahwa:

"Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen".

d) Uji Autokorelasi

Singgih Santoso (2012:241) menguraikan patokan/standar untuk autokorelasi sebagai berikut:

1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2) Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

2) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda Menurut Sugiyono (2010:149) menjelaskan bahwa:

"Analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dideterminasi oleh penagihan pajak dan ekstensifikasi wajib pajak. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator.

3) Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel (independen dan dependen) dan ukuran yang dipakai untuk menentukan derajat atau kekuatan hubungan korelasi tersebut.

Pengukuran koefisien menurut Sugiyono (2012:216) adalah sebagai berikut:

"Pengukuran koefisien ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *pearson correlation product moment*, untuk menguji hubungan asosiatif/hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio".

4) Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisiensi determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel dependen (Y) dideterminasi oleh variabel independen (X) yang dinyatakan dalam persentase.

5) Pengujian Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

a) Hipotesis parsial antara variabel bebas penagihan pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Ho: Tidak dideterminasi signifikan Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi oleh Penagihan Pajak.

Ha: Dideterminasi signifikan Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi oleh Penagihan Pajak.

b) Hipotesis parsial antara variabel bebas Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
   Ho: Tidak dideterminasi signifikan Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi oleh Ekstensifikasi Wajib Pajak.
   Ha: Dideterminasi signifikan Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi oleh Ekstensifikasi Wajib Pajak.

c) Hipotesis secara keseluruhan antara variabel bebas Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
   Ho: Tidak dideterminasi signifikan Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi oleh Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.
   Ha: Dideterminasi signifikan Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi oleh Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dideterminasi oleh penagihan pajak dan ekstensifikasi wajib pajak. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Laporan Surat Paksa yang diterbitkan, Laporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Salah Satu KPP Di Kota Bandung selama 60 bulan pada periode 2012-2016.

4.1.1 Korelasi Parsial

Analisis korelasi parsial berfungsi untuk mencari kuatnya hubungan antara masing-masing variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak secara parsial dengan Penerimaan PPh Orang Pribadi.

a) Korelasi antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pada tabel 4.14 (hal.76), dapat dilihat koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,373 termasuk dalam kategori hubungan yang rendah dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya semakin banyaknya penagihan pajak melalui surat paksa yang diterbitkan, akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

b) Korelasi antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pada tabel 4.15 (hal.77), dapat dilihat koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,222 termasuk dalam kategori hubungan yang rendah dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya semakin banyaknya jumlah wajib pajak terdaftar, akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

4.1.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak secara simultan dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil output dari pengolahan data, diperoleh informasi bahwa R-*square* sebesar 0,197 atau 19,7%. Nilai tersebut menunjukan bahwa Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak secara simultan dalam memberikan pengaruh terhadap variabel Penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar 19,7%. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 19,7% = 80,3% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

4.2 PEMBAHASAN

Setelah dilakukan beberapa pengujian dalam penelitian ini, selanjutnya terdapat beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini mengenai hasil pengujian untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dideterminasi oleh Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

4.2.1 PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DIDETERMINASI OLEH PENAGIHAN PAJAK

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dideterminasi oleh penagihan pajak yaitu tergolong dalam kategori rendah. Hubungannya bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Besar presentase Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dideterminasi oleh penagihan pajak yaitu sebesar 37,3%. Dilihat dari hasil tersebut, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dideterminasi oleh penagihan pajak kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 63,7% yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi seperti, jumlah wajib pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran wajib pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Hasil penelitian di dukung oleh landasan teori yang dikemukakan oleh Waluyo (2009:238) yaitu semakin meningkatnya penagihan pajak maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak. Dan penelitian mengenai Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh Tika Yuniarti (2016) dan Fadly Adam Noor (2016) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara signifikan.

4.2.2 PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DIDETERMINASI OLEH EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dideterminasi oleh ekstensifikasi wajib pajak yaitu tergolong dalam kategori rendah. Hubungannya bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah ekstensifikasi wajib pajak maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Besar presentase Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dideterminasi oleh ekstensifikasi wajib pajak yaitu sebesar 22,2%. Dilihat dari hasil tersebut, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dideterminasi oleh penagihan pajak kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 77,8% yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi seperti, jumlah wajib pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran wajib pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Hasil penelitian di dukung oleh teori yang dikemukakan oleh Edi Slamet Irianto, Rosdiana, dkk (2012:25) yaitu semakin banyak jumlah Wajib Pajak semakin tinggi jumlah penerimaan karena semakin banyak jumlah kontributornya, nampaknya perlu peningkatan kualitas calon Wajib Pajak potensial, sehingga tercapai suatu keseimbangan baru *tax percapita* yang semakin meningkat. Dan penelitian mengenai ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh Tri Elizabeth (2014) dan Irlangga Prima Jaya (2016) menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh ekstensifikasi wajib pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dideterminasi oleh Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak pada Salah Satu KPP Di Kota Bandung dengan segala keterbatasan penulisan, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dideterminasi oleh Penagihan Pajak. Hubungannya bersifat positif, artinya jika jumlah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi juga akan meningkat.

Tingginya jumlah penerbitan surat paksa disebabkan oleh wajib pajak yang masih memiliki hutang pajak dan belum melunasinya yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, serta tidak dibayarnya pajak oleh penanggung pajak yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Korelasi antara penagihan pajak dengan surat paksa dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tergolong dalam kategori rendah. Besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi melalui penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dapat disebabkan oleh jumlah wajib pajak yang membayar hutang pajaknya setelah dilakukan penagihan pajak melalui surat paksa.

2. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dideterminasi oleh ekstensifikasi wajib pajak. Hubungannya bersifat positif, artinya jika jumlah wajib pajak terdfatar meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi juga akan meningkat. Tingginya jumlah wajib pajak terdaftar disebabkan oleh program ekstensifikasi wajib pajak yang terlaksana dengan baik sehingga banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Korelasi antara ekstensifikasi wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tergolong dalam kategori rendah. Besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi melalui ekstensifikasi wajib pajak tersebut dapat disebabkan oleh wajib pajak yang sudah mengikuti program ekstensifikasi wajib pajak dengan baik untuk mendapatkan NPWP.

Berdasarkan kesimpulan diatas memberikan makna bahwa angka yang sebelumnya sudah diuji yaitu tidak bias. Artinya, karena keterbatasan penelitian yang hanya memfokuskan kepada penrimaan PPh OP yang dideterminasi oleh penagihan pajak dan ekstensifikasi wajib pajak, belum mengelaborasi dari temuan dengan teori.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai Penerimaan PPh OP dideterminasi oleh Penagihan Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Majalaya, maka diberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak, disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya agar penerbitan Surat Paksa hendaknya dilakukan secara tepat waktu dan penanggung pajak merasa terpantau atau terawasi oleh KPP sehingga dapat memperkecil penanggung pajak dalam usahanya untuk menunda-nunda pelunasan pajak sehingga terlampaui daluwarsa penagihan pajak.
2. Untuk program ekstensifikasi sebagai program penambahan jumlah wajib pajak perlu dikaji kembali, sehingga wajib pajak yang sudah terdaftar ataupun yang baru terdaftar dituntun untuk melakukan dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak sehingga terlihat bagaimana dampaknya apakah tunggakan pajak akan menurun atau meningkat.

5.2.2 Saran Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi lebih lanjut bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian. Saran tersebut bisa dijalankan sebagai masukan tanpa adanya variabel penentu lainnya sehingga mengacu kepada teori yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, S.H., M.H.2011.*Hukum Pajak*.Jakarta: Sinar Grafika.

Aisyah. 2009-2012. *Pengaruh Jumlah Wajib Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang.* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Andriani (2011). Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.

Arridel Mindra, Kepala Bidang Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Jawa Tengah I. 2014. *Pajak Kepemimpinan Dan Masa Depan:* Kanwil DJP Jateng 1.

Ayi Miraj Sidiq.2016.KPP Pratama Majalaya.

Bambang Brodjonegara. 2016. *Pemerintah Fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Capai Target Penerimaan 2016*. Melalui http://kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-fokus-pada-wajib-pajak-orang-pribadi-untuk-capai-target-penerimaan-2016. Diakses pada tanggal 1 Mei 2017.

Chairuddin Syah Nasution. 2003. *Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 –2000*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2 Juni. hlm. 29-33.

Diaz Priantara.2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. hlm.135.

Direktorat Jendral Pajak. 2009. *Pelaksaan Penagihan dengan Surat Paksa*:Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak.*329 Penanggung Pajak Dicegah Ke Luar Negeri, 29 Disandera.*Senin, 6 Juli 2015 - 12:44 from http://pajak.go.id/content/article/329penanggung-pajak-dicegah-ke luarnegeri29-disandera

Djajadiningrat (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Djoko Slamet Surjoputro.2009. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta:Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. hlm. 3.

Edi Slamet Irianto, Rosdiana, dan Haula. 2012. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia.* Jakarta: Visimedia Pustaka.

Edi Slamet Irianto. 2014. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia.* Jakarta: Visimedia Pustaka.

Edi Slamet Irianto, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP*. Kurang Pegawai Ditjen Pajak Tak Bisa Periksa Semua Orang*. Kamis, 25 Feb 2016 19:37 WIB http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/02/25/218589/kurang pegawai-ditjen-pajak-tak-bisa-periksa-semua-orang/#.Vu7g3EB0pNA

Endang Haolia. 2015. *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan: Studi Kasus Pada Kanwil DJP Jabar I*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.

Erly Suandy.2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.hlm.84.

Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak Edisi Ketiga.* Jakarrta: Salemba Empat.

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak (Edisi 5).* Jakarta: Salemba Empat.

Fadly Adam Noor. 2016. *Pengaruh Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: Studi Kasus Pada KPP Pratama Sumedang.* Jurnal Universitas Komputer Indonesia.

Fuad Rahmany .2011.*Buku Panduan Sensus Pajak Nasional*; Direktorat Jenderal Pajak.

Fuad Rahmany,.*Tunggakan Pajak Rp 71 Triliun Belum Juga Dilunasi*.Senin, 05/12/2011 10:43 WIB from http://finance.detik.com/read/2011/12/05/104359/1782546/4/tunggakanpajak-rp-71-triliun-belum-juga-dilunasi

Gujarati Damodar N.2003. *Ekonometrika Dasar*.Jakarta:Erlangga.172-406.

Gunadi. 2011. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan.* Jakarta: Bee Media.Indonesia.

Gunawan. 2012.Medanbisnisdaily.com,. 2 Januari.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Iryanto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Iqbal Hasan. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*.Jakarta: Bumi Aksara.hlm.4.

Irlangga Prima Jaya. 2016. *Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dideterminasi Oleh Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak: Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.* Jurnal Universitas Komputer Indonesia.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu- Isu Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo. *Total Pendapatan APBN 70 Persen dari Pajak*. Oleh: Bisri Mustofa 24 Februari, 2016- 14:24 from http://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2016/02/24/362219/totalpendapatan-apbn-70persen-dari-pajak

Liswatin. 2005. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu Januari 2002 s/d Desember 2003). Skripsi (S1). Ekonomi Pembangunan: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Mahendra, Putu Putra. 2013. *Pengaruh kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak pada*

penerimaan pajak penghasilan badan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
M Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek* Yogyakarta: BPFE UGM. hlm.93.
Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi. hlm.121.
Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Mardiasmo. 2013. *Perpajakan : Edisi Revisi.* Yogyakarta : Andi.
Menkeu, Martowardoyo .2011. 21 Desember. Media Indonesia.com
Moeljohadi (2010). Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan. Bandung: Graha Ilmu.
Muljono, Djoko. 2008. *Ketentuan Umum Perpajakan*, Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
P.J.A Andriani. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Pt.Gramedia.hlm.2
Panca Kurniawan, dan Bagus Pamungkas.2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm.1.
Priana, Wirasaputra*. Terapkan Pidana Pajak*. 8 September 2015 from http://bandungekspres.co.id/2015/terapkan-pidana-pajak/
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.2002. *"Teori Perpajakan dan Kasus"*. Jakarta: salemba empat.hlm. 42.
Putra, Hendra Wahyu Adi. 2008. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan: Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees.* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widytama. Bandung.
Rahmad Husein. 2013. *Pengaruh Inflasi Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.* Padang: Unversitas Bung Hatta.
Rochmat Soemitro (2012). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu
Singgih Santoso.2002. SPSS Versi 11.5 Cetakan kedua Jakarta: Gramedia.hlm.393.
Singgih Santoso.2007. SPSS Versi 11.5 Cetakan ketiga Jakarta: Gramedia.hlm.322.
Singgih Santoso.2012. Analisis SPSS pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komput indo. hlm.241.
Simanjuntak Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi,* Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.
Siti Kurnia Rahayu. 2008. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siti Kurnia Rahayu*,* 2010 . *Perpajakan Indonesia: Konsep dan. Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati, 2013, Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan,Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu
Siti Resmi.2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.hlm.40.
Siti Resmi.2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.hlm.19.
Siti Resmi.2009. *Perpajakan*. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.hlm.10.
Siti Resmi.2011.*Perpajakan: Teori & Kasus Buku Satu.* Jakarta. Salemba Empat.
Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif .* Surabaya: Salemba Empat.
Stevanus, Sujoko dan Yuliawati.2007. *Metode Penelitian* .Metode Penelitian Untuk Akuntansi.Jakarta : Ghalia Indonesia.hlm.7.
Sugiyono .2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 1.Bandung: ALFABETA.hlm.14.
Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung: ALFABETA.hlm.*32.*
Sugiyono .2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*Bandung: ALFABETA.hlm.21-286.
Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung: ALFABETA.hlm. 58-279.
Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono.2012. *Memahami penelitian Kualitatif* .Bandung: ALFABETA.hlm.55 256.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
Sugiyono.2014.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
Sulaiman.2011.*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak.* Nusa Tenggara Timur.
Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE – 06/PJ.9/2001, Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak
Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang Kriteria WP Efektif dan WP Non Efektif.
Surat Edaran Direktur Jendral Pajak yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.
Syahab, Z.M dan Gisijanto, H.A. 2008. *Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pengahsilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol. 13 No. 12. Jurusan Akuntansi, FE UG.
Tika Yuniarti. 2016. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Tegalega.* Jurnal Universitas Komputer Indonesia.
Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Penebar Swadaya Grup.
Tri Elizabeth. 2014. *Pengaruh Ektensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.
Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.
Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.hlm. 4189.
Vinelia Augustina Marpaung.2007. "*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak di Sumatera Utara".* Medan.
Waluyo L.2008. *Teknik dan Metode Dasar dalam Mikrobiologi*. Universitas Muhammadiyah. Malang :Malang Press.hlm.23.
Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.